

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pariwisata adalah sektor yang memiliki manfaat dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi di Negara berkembang sebagaimana yang diungkapkan Hakim (2004, hlm.5) bahwa “ di Negara-negara yang tingkat perkonomiannya dikategorikan berkembang, sektor pariwisata secara aktif dipromosikan sebagai kunci dari pertumbuhan ekonomi”. Dengan kata lain sektor pertanian di Negara berkembang seperti Indonesia mempunyai peran yang besar dalam pertumbuhan ekonomi.

Indonesia memiliki potensi alam yang sangat tinggi, dimana jika pemanfaatannya tidak dilestarikan dan dijaga maka potensi alam yang melimpah ini bisa habis begitu saja tanpa pemanfaatan yang baik. Dalam upaya pemanfaatan dan pelsetarian sumber daya alam diberlakukan pengelolaan sumber daya alam yang mana difokuskan pada hal pemanfaatan atau eksploitasi sumber daya alam dan perlindungan atau konservasi. banyak kebijakan dibuat oleh pemerintah dalam upaya pelestarian diantara dengan menetapkan kawasan-kawasan yang harus dilindungi dan kawasan-kawasan tertentu yang dapat dijadikan sebagai kawasan yang dapat dieksplotasi. Akan tetapi bukan berarti kawasan-kawasan tertentu yang dijadikan kawasan yang bisa dieksploitasi bisa dipamfaatkan secara berlebihan namun harus berdasarkan aspek-aspek yang telah ditetapkan pemerintah agar kawasan-kawasan tersebut bisa tetap dilestarikan.

Sementara itu dalam rangka perlindungan sebagaimana yang tercatat oleh biro perencanaan departemen kehutanan Indonesia 1996/1997 dalam Nugroho (2011,hal.12), berbagai kawasan kemudian ditetapkan sebagai kawasan lindung ataupun kawasan konservasi seperti hutan lindung, kawasan bergambut, kawasan resapan air, sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, kawasan sekitar mata air, kawasan suaka alam (termasuk, cagar alam), kawasan suaka alam laut dan lainnya, mangrove, taman nasional, taman hutan raya, taman

wisata alam, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, kawasan rawan bencana alam. Kawasan-kawasan tersebut kini marak dijadikan lokasi eksploitasi

yang mana jika hal ini terus dibiarkan akan berdampak pada kekayaan alam itu sendiri.

Banyak komentar kurang baik yang ditujukan pada pemerintah yang dianggap kurang serius dalam pelaksanaan pencegahan dalam memberlakukan peraturan pemerintah yang ditetapkan untuk pelestarian kawasan yang dilindungi. Pemerintah seringkali beranggapan bahwa kurangnya terlaksana kebijakan-kebijakan yang ditetapkan karena luasnya kawasan Indonesia yang menjadikan hambatan bagi pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Akan tetapi hal ini juga termasuk dalam sulitnya birokrasi yang ada didalam pemerintah itu sendiri dimana dari dalam instansinya saja sudah sulit diberlakukan kebijakan dan begitu pulan yang terjadi diluar intasi yang kerap sulit dilakukan kebijakan. Kebijakan terpusat telah mematikan potensi dari pemerintah daerah, masyarakat lokal atau adat, maupun potensi jangka panjang dari keberlanjutan dan kelestarian sumber daya alam dan kawasan konservasi itu sendiri.

Populasi manusia yang terus berkembang setiap tahunnya menyebabkan kebutuhan akan pariwisata semakin meningkat sedangkan suatu objek wisata itu bersifat statis atau titik bertambah. Awalnya perkembangan wisata secara besar-besaran ini diyakini tidak mengganggu lingkungan dan tidak menimbulkan polusi. Namun, banyak temuan-temuan yang mengindikasikan bahwa aktivitas wisata (dalam banyak hal) sangat merugikan ekosistem, terutama ekosistem destinasi wisata setempat. Dalam banyak kasus, tempat-tempat yang dulunya indah dan digunakan sebagai tujuan favorit wisata menjadi tercemar oleh logam berat dan bahan-bahan kimia berbahaya lainnya. Perkembangan dan pertumbuhan wisatawan yang besar dan tidak terkontrol, telah mendorong laju kerusakan habitat dan erosi pantai. Dampak tidak langsung lainnya, sebagaimana yang diungkapkan Lindberg (1995) dalam Nugroho (2011, hal.15) yakni eksploitasi terhadap bentuk-bentuk kehidupan yang ada

di daerah wisata. Kini seiring berjalannya waktu mulai terasa efek negatif dari pariwisata masal yaitu kerusakan-kerusakan lingkungan.

Di tengah dinamika ekonomi dunia, globalisasi ekonomi yang belum tuntas, kenaikan harga minyak dunia, serta tarik menarik kepentingan ekonomi dunia maju dan dunia ketiga, telah berkembang suatu jenis jasa wisata yang memberi jaminan bagi terciptanya kesejahteraan. Sektor usaha tersebut dikenal dengan *ecotourism* atau ekowisata. Indonesia memiliki potensi alam yang sangat tinggi, dimana jika pemanfaatannya tidak dilestarikan dan dijaga maka potensi alam yang melimpah ini bisa habis begitu saja tanpa pemanfaatan yang baik. Dalam upaya pemanfaatan dan pelsetarian sumber daya alam diberlakukan pengelolaan sumber daya alam yang mana difokuskan pada hal pemanfaatan atau eksploitasi sumber daya alam dan perlindungan atau konservasi. taman nasional sebagai kawasan yang digunakan untuk pelestarian sumber daya alam kini menawarkan wisata yang berbasis ekowisata. Taman nasional yang menawarkan wisata ekologis banyak diminati wisatawan, hal ini karena adanya pergeseran paradigma kepariwisataan internasional dari bentuk pariwisata masal (*mass tourism*) ke wisata minat khusus yang disebut ekowisata. Oleh karena itu timbulah gagasan baru dalam pengembangan pariwisata yang disebut dengan pembangunan pariwisata berkelanjutan yaitu pembangunan pariwisata yang lebih mengedepankan kelestarian lingkungan. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Damanik & Weber (2006, hlm.8) bahwa “kegiatan pariwisata yang bertanggungjawab terhadap kesejahteraan masyarakat lokal dan pelestarian lingkungan sangat ditekankan dan merupakan ciri khas ekowisata.”

Potensi Indonesia dalam penerapan konsep ekowisata sangat besar karena masih banyak keindahan alam yang masih alami dan belum dimanfaatkan, seperti yang dikemukakan oleh Nugroho (2011, hlm.3) bahwa:

Indonesia memiliki potensi keindahan dan kekayaan alam yang bernilai tinggi dalam pasar industry wisata alam, khususnya ekowisata. Sebagai bentuk wisata yang sedang

trend, ekowisata mempunyai kekhususan tersendiri yaitu mengedepankan konservasi lingkungan, pendidikan lingkungan, kesejahteraan penduduk lokal dan menghargai budaya lokal.

Melihat pernyataan di atas, dengan kekayaan alam Indonesia yang tinggi, menjadikan potensi yang besar untuk melaksanakan ekowisata, agar potensi kekayaan alam di Indonesia ini tetap lestari dan dapat dirasakan oleh generasi yang akan datang.

Jawa barat adalah salah satu provinsi dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Wilayah Jawa Barat memiliki kekayaan alam yang sangat indah untuk dikunjungi, mulai dari pegunungan hingga pantai menawarkan keindahan yang luar biasa. Ibu kota Provinsi Jawa Barat adalah Bandung dimana Bandung mempunyai potensi pariwisata yang sangat besar, baik dari sisi keindahan alam maupun kekayaan budayanya. Keindahan alam seperti pegunungan, situ, waduk, curug hingga hutan menawarkan pemandangan yang indah dan menarik untuk dikunjungi. Budaya yang mendominasi di daerah Bandung adalah budaya Sunda. Keramahannya, bahasa, kesenian, nilai-nilai tradisional yang unik menjadi potensi pariwisata yang menarik untuk dikunjungi. Selain memiliki keindahan alam dan keunikan budaya Bandung memiliki posisi yang cukup strategis karena berdekatan dengan ibu kota Negara Indonesia yaitu Jakarta. Dengan posisi tersebut membuat minat wisatawan untuk berkunjung ke daerah Bandung menjadi besar karena berdekatan dengan Jakarta yang menjadi pintu masuk wisatawan mancanegara ke Indonesia, dan dapat menjadikan variasi wisata oleh para wisatawan. Wisatawan dapat berwisata di pantai yang terletak di daerah Jakarta dilanjutkan dengan berwisata ke Bandung untuk menikmati keindahan alamnya.

Bergeser ke wilayah Bandung Timur, tidak banyak orang yang tahu bahwa Bandung memiliki Hutan Taman Buru Nasional yang merupakan 1 dari 15 Taman Buru yang ada di Indonesia, dimana lokasi taman buru tersebut berada pada daerah

administratif Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Sumedang yakni Kawasan Konservasi Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi. Sebagai salah satu upaya konservasi sumber daya alam hayati dan hewani berupa satwa liar telah ditempuh melalui penetapan kawasan hutan konservasi-taman buru yang merupakan bentuk pemanfaatan satwa liar yang dilaksanakan dalam bentuk perburuan. Hingga saat ini, perburuan satwa buru masih berjalan kurang teratur dan masih banyak terjadi perburuan tanpa izin, yang mengancam kelestarian satwa.

Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi ditunjuk menjadi taman buru dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 29/Kpts/Um/5/1976 pada tanggal 15 Mei 1976, dan ditetapkan menjadi taman buru dengan Surat keputusan Menteri Kehutanan No. 298/Kpts-II/98 pada tanggal 27 februari 1998. Kawasan Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi ini memiliki luas 12.443,1 Ha.

Karena termasuk kawasan konservasi, kawasan ini menjadi tanggung jawab Departemen Kehutanan.Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Barat.Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi. Sekarang, taman buru ini berada di bawah koordinasi Bidang Wilayah II dan Seksi Konservasi Wilayah III BBKSDA Jabar.

Pada April 2008, BBKSDA mengeluarkan Surat Keputusan No. 750/BBKSDA JABAR/1/2008, dimana Wanadri menjadi mitra dalam pengelolaan Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi. Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana pengeloaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, Taman Buru ditetapkan fungsinya sebagai kawasan hutan konservasi. Dengan demikian, Taman Buru ditinjau dari aspek konservasi sejajar dengan kawasan hutan konservasi lainnya seperti Taman Wisata, Taman Hutan Raya, Taman Nasional, Cagar Alam dan Suaka Margasatwa. Di sisi lain, sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 tentang ketentuan Pokok Kehutanan, yaitu

berdasarkan fungsinya hutan Negara dibagi kedalam empat tipe (Hutan Lindung, Hutan Produksi, Hutan Suaka Alam dan Hutan Wisata), Taman Buru diklasifikasikan sebagai hutan wisata, karena di dalamnya terdapat satwa buru yang memungkinkan terselenggaranya perburuan yang teratur bagi kepentingan olahraga berburu dan rekreasi. Berdasarkan PP No. 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru, dijelaskan bahwa Taman Buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai diselenggarakan perburuan secara teratur.

Kondisi Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi yang masih belum dikelola secara maksimal merupakan sebuah tantangan yang harus dihadapi oleh berbagai pihak terutama pemerintah, untuk mewujudkan pariwisata berburu yang berkelanjutan di masa depan. Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi saat ini direncanakan untuk dikelola dengan pendekatan yang mengacu pada konsep dasar berupa konsep pembangunan kawasan dan ekowisata yang berkelanjutan.

Perencanaan ini diperlukan karena Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi sangat luas dan belum terkoordinasi dengan baik untuk dapat diawasi. Sementara itu, telah terjadi banyak penyalahgunaan kawasan pada masa lalu yang tidak hanya merugikan pihak pengelola, tapi juga masyarakat secara umum, mengingat kawasan Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi adalah kawasan konservasi yang menjadi penyangga kehidupan di daerah sekitarnya.

Ada beberapa keunggulan lainnya yang menarik dari Taman Buru Gunung Kareumbi Masigit ini diantaranya :

1. Konservasi (wali pohon)
2. Penelitian dan pengembangan flora dan fauna
3. Pengembangan biakan rusa
4. Ekowisata
5. Pemberdayaan masyarakat
6. Ekosistem

7. Diklat (mitigasi bencana)

Dari ketujuh keunggulan yang ada di Taman Buru Gunung Kareumbi Masigit ini salah satu keunggulan yang menarik perhatian peneliti yakni ekowisata, dimana pada kawasan taman buru ini pengeksploitasian terhadap flora dan fauna dilakukan, namun berada pada kawasan konservasi dimana sebagaimana yang tertulis pada UU No.5 tahun 1990 dimana tujuan konservasi yakni:

1. Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan

Menurut Pitana dan Gayatri (2005) dalam Nugroho (2011,hal.43) dalam menata fungsi dan peruntukan kawasan hutan sebagaimana telah dituangkan dalam Tata Guna Hutan, kawasan hutan tetap seluas 113 juta ha telah dialokasikan peruntukannya sebagai berikut:

- a. Hutan Lindung : 30 juta ha
- b. Hutan Suaka dan Wisata : 19 juta ha
- c. Hutan Produksi : 64 juta ha

2. Pengawetan Keanekaragaman Hayati

Berdasarkan angka tersebut, strategi perlindungan sistem penyangga kehidupan telah diakomodasikan dalam kawasan lindung seluas 30 juta ha, hutan suaka/wisata seluas 19 juta ha, serta sebagian hutan produksi yang berupa jurang, daerah mata air, tepi pantai, tepi sungai yang merupakan daerah yang dilindungi. Dengan demikian, sekurang-kurangnya terdapat sekitar 50 juta ha kawasan hutan atau sekitar 44 % dari kawasan hutan tetap atau bila dibandingkan dengan luas daratan Indonesia sekitar 26 % yang merupakan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan.

Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dalam pembangunan kehutanan diwujudkan melalui bentuk :

- a. Konservasi di luar kawasan (*ex-situ*), antara lain dengan melakukan pemeliharaan dan pembiakan tumbuhan atau satwa di tempat penangkaran, kebun binatang, taman burung, arboretum, taman hutan raya. Disamping itu juga

dilakukan dengan penetapan jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, pembatasan dalam pemungutan, dan pengenaan sanksi bagi yang melanggarnya,

- b. Konservasi di dalam kawasan (*in-situ*), dilakukan dalam bentuk penetapan dan pengelolaan kawasan suaka alam (cagar alam dan suaka margasatwa) dan zona inti taman nasional. Negara Indonesia memiliki Cagar Alam sebanyak 167 unit seluas 6,35 juta ha. tersebar di seluruh propinsi, Suaka Margasatwa sebanyak 44 unit dengan luas 2,7 juta ha., 24 unit Taman Nasional dengan luas sekitar 6,8 juta ha Nugroho (2011,hal.51).

3. Pemanfaatan Secara Lestari

Konsep ini diterapkan pada kawasan hutan produksi. Di bidang pengusahaan hutan, dikenal adanya sistem silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) dan Tebang Habis Dengan Permudaan Buatan (THPB). Kedua sistem tersebut pada prinsipnya juga menganut strategi pemanfaatan secara lestari. Pada bidang pemungutan hasil hutan non kayu, khususnya satwa, juga menganut strategi tersebut antara lain dengan penetapan quota tangkap dan quota pemasaran (khususnya ekspor). Pembatasan ini juga dimaksudkan jangan sampai kegiatan pemungutan melampaui daya dukung alamnya. Prinsip yang dianut dalam rangka pemungutan satwa di alam adalah untuk menjaga keseimbangan antara daya dukung habitat dengan populasi satwanya. Sebagai contoh, penangkapan kerbau liar di Baluran dapat dilakukan sekitar 200-300 ekor per tahun agar daya dukung habitat dapat menjamin perkembangan kerbau liar di alam secara baik. Dalam kegiatan penangkaran satwa, kewajiban melakukan *restocking* sebanyak 10 % dari anakan untuk dikembalikan ke alam, juga merupakan tindakan pembatasan pemanfaatan yang bernafaskan kelestarian.

Sejalan dengan tujuan ekowisata itu sendiri dimana wisata alam berdampak ringan yang menyebabkan terpeliharanya spesies dan habitatnya secara langsung dengan peranannya dalam pelestarian dan atau secara tidak langsung dengan memberikan pandangan kepada masyarakat setempat, untuk membuat masyarakat

setempat dapat menaruh nilai, dan melindungi wisata alam dan kehidupan lainnya sebagai sumber pendapatan).

Seperti yang telah dijabarkan, hal ini berbanding terbalik dengan tujuan konservasi dan ekowisata yang pada dasarnya mengedepankan pada pelestarian flora dan fauna. Oleh karena itu, peneliti lebih menitik beratkan pada potensi ekowisata yang berada pada kawasan konservasi taman buru.

B. Identifikasi Masalah

Peneliti telah memfokuskan penelitian terhadap permasalahan yang terjadi dengan berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas. Untuk lebih memperjelas maksud serta batasan masalah yang akan diteliti, sehingga peneliti merumuskan beberapa hal terkait penelitian yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Potensi ekowisata ada di Kawasan Koservasi Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi sangat menarik perhatian peneliti hal ini mendorong peneliti mengambil judul penelitian ini adalah “Potensi Ekowisata di Kawasan Koservasi Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi”
2. Pengembangan yang berwawasan ekowisata perlu dibuatkan zonasi-zonasi untuk perencanaan pengembangan infrastruktur yang menghasilkan sebuah peta zonasi Kawasan Koservasi Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi.
3. Peran pengelola untuk pengembangan ekowisata tanpa merusak apa yang sudah ada di Kawasan Koservasi Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan sebelumnya maka di ambil rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Potensi apa saja yang mendukung Kawasan Konservasi Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi sebagai ekowisata ?
2. Bagaimana zonasi ekowisata yang ada di Kawasan Konservasi Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi ?

3. Bagaimana upaya dari pengelola agar tidak terjadi kepunahan bagi flora dan fauna yang ada di Kawasan Konservasi Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi ?

D. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pasti memiliki tujuan-tujuan tertentu, adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini antara lain:

1. Menganalisis Potensi yang mendukung Kawasan Konservasi Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi sebagai ekowisata
2. Memetakan zonasi ekowisata di Kawasan Konservasi Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi
3. Mengidentifikasi upaya dari pengelola agar tidak terjadi kepunahan bagi flora dan fauna yang ada di Kawasan Konservasi Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dunia akademis khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Manfaat dari penelitian antara lain :

1. Manfaat Teoritis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk memperkaya ilmu Geografi Pariwisata dalam hal mengenai pariwisata dalam bentuk ekowisata, pengembangan ekowisata, mengetahui potensi-potensi ekowisata serta pembuatan zonasi untuk wilayah ekowisata dan hasil kajian diharapkan dapat dijadikan referensi guna penelitian lebih lanjut tentang potensi ekowisata di kawasan Konservasi Taman Buru Gunung Masigit, selain itu dapat memberikan pengetahuan tentang ekowisata kepada masyarakat maupun wisatawan.
2. Manfaat Praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pengelola dan pemerintah setempat dalam hal pengelolaan dan pengembangan daya tarik wisata di kawasan Konservasi Taman Buru Gunung Masigit.

F. Struktur Organisasi Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Bab 1 menguraikan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional serta struktur organisasi skripsi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab 2 menguraikan tentang teori-teori yang mendukung penelitian dan diharapkan dapat menjawab masalah penelitian. Hal-hal yang dijabarkan dalam bab ini yaitu Peran dan Fungsi Taman Nasional, Wisata Edukasi, Ekowisata dan Wisatawan.

BAB III PROSEDUR PENELITIAN

Bab 3 menguraikan tentang lokasi penelitian, populasi dan sampel, metode penelitian, variabel penelitian, definisi operasional, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, alat pengumpul data, teknik pengolahan data, teknik analisis data serta alur pemikiran penelitian

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab IV membahas mengenai potensi ekowisata yang ada di Kawasan Konservasi Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi, zonasi ekowisata dan upaya pelestarian flora dan fauna oleh pengelola

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab V berisikan tentang kesimpulan yang didapat penulis setelah melakukan penelitian ini, serta tidak lupa dicantumkan pula beberapasaran yang diharapkan dapat berguna bagi keberlangsungan pengelolaan wilayah tersebut